

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Akbar, Patrialis, 2015, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengaturan Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ana Rosmiati, 2017, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, ISI Press, Surakarta.
- Arens, A.A. et al, 2012, *Jasa Audit dan Assurance*, Salemba Empat, Jakarta.
- Firmansyah Arifin, dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), Jakarta.
- H. Bohari, 1992, *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Hiro Tugiman. 1997. *Standar Profesional Audit Internal*, Kanisius, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamik Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ida Hanifah, dkk, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Cetakan Pertama*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2012, *Pekembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2015, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Pers, Malang.

Kaligis, O. C., 2012, *Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi BPK vs BPKP*, Yarsif Watampone, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Muhammad Djafar Saidi, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mulyadi, 2016, *Sistem Informasi Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.

Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nurmayanti, 2000, *Hukum Administrasi Negara*, Buku Ajar Universitas Bandar Lampung, Lampung

Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saidi, Muhammad Djafar, 2013, *Hukum Keuangan Negara: Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Siagian, Sondang P., 2000, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Jakarta, Jakarta.

Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Silalahi, Artha Debora, 2022, *Konfigurasi Kelembagaan BPKP dan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.



Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sujonto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suwarna, 2014, *UUD 1945 Plus UUD Di Indonesia Dan Lembaga Tinggi Negara*, Lima Adi Sekawan, Jakarta.

Tri Wibowo, 2017, *Evolusi Pengawasan Keuangan Negara di Indonesia*, UI Press, Jakarta.

TB Massa Djafar, dkk, 2021, *Sistem Demokrasi Pancasila Edisi Kedua*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ujiyanto, Srie Hartutie dan M. Amin, 2017, *Keuangan Negara*, Indomedia Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi Bagi Kepala Jawatan Akuntan Negara.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1963 tentang Pengawasan Keuangan Negara.

Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan pada Departemen Keuangan Kabinet Ampera.

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama Direktorat Jenderal Keuangan Menjadi Direktorat Jenderal Moneter serta Perubahan dan Penyempurnaan Direktorat-Direktorat dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Moneter pada Departemen Keuangan.

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1984 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.



Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

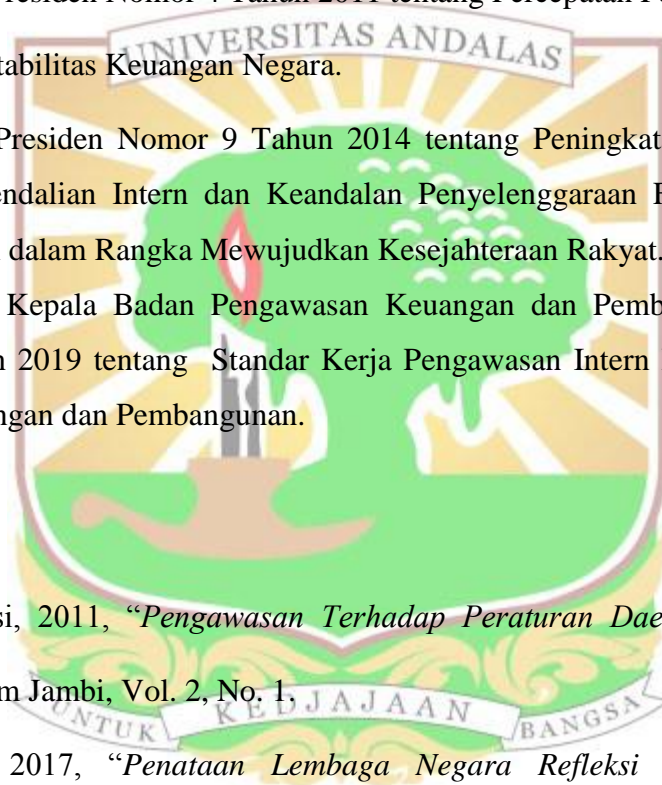
C. Jurnal

A. Zarkasi, 2011, "*Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah.*", Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 2, No. 1,

Abustan, 2017, "*Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguatan Sistem Presidensial*", Jurnal Al'Adl, Vol. IX, No.2.

Adi, Haryo Wiratma dan Inggriani Elim, 2018, "*Ipteks Peran Pengawasan BPKP dalam Mengawal dan Mengoptimalkan Penerimaan Negara*", Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat, Vol. 2, No. 2.

Gilang Prama Jasa dan Ratna Herawati, 2017, "*Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara*", Jurnal Law Reform, Vol. 13, No. 2.



Simajuntak, Dumari, 2017, “Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Mewujudkan BPK yang Independen”, *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 47, No. 2.

Utami Dewi, 2017, “Kedudukan Badan Pemeriksa keuangan dan Pembangunan Dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Kalimantan Barat)”, *Jurnal Hukum Universitas Tanjungpura*, Vol. 4, No. 4.

D. Majalah/Harian

Hartono, Bambang Puji, 2013, “BPKP Dari Masa Ke Masa”, *Paraiatte*, Vol. 17, Tahun VI-2013.

Janedri, M. Ghaffar, 2008, *Penataan Kelembagaan, Harian Seputar Indonesia*.

E. Website

<https://www.bpkp.go.id/>

<https://www.bpkp.go.id/kalteng>

<https://www.bpk.go.id/>

<https://map/bpkp.go.id/>

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/>

Laporan Akhir Kompedium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara), <https://bphn.go.id>.

Kusuma, Hendra. “Tak Ditindaklanjuti, Temuan BPK Ini Bisa Bikin Negara Rugi Rp. 4 T”, <http://www.finance.detik.com>.

Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, <https://business-law.binus.ac.id/>.

